

**KEEFEKTIFAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
(GEPENG) OLEH DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

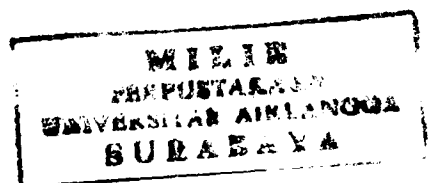
Titik Apriyanti

*Apr
k*



**Disusun Oleh
TITIK APRIYANTI
NIM 070316954**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPARTEMEN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2007/2008**



ABSTRAKSI

Gelandangan dan pengemis adalah salah satu kelompok masyarakat yang kurang beruntung kehidupannya, di tengah-tengah padatnya kota-kota besar seperti Kota Surabaya. Mereka dikalahkan oleh kemiskinan serta masalah sosial yang melanda sehingga terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis. Tidak mempunyai bekal keterampilan dan kemampuan yang cukup memadai membuat mereka terus mempertahankan profesi atau pekerjaan mereka. Namun keberadaannya membuat resah Pemerintah setempat dan masyarakat di sekitarnya karena mereka mendirikan bangunan/rumah-rumah kumuh di pinggir atau di stren-stren kali. Setelah beberapa kali terkena razia, mereka tidak jera mereka tetap kembali menggelandang dan mengemis, selain itu karena gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar daerah Surabaya sudah tidak mempunyai tanah tempat tinggal, rumah ataupun sanak saudara sehingga mereka pasrah dengan apa yang terjadi di Surabaya termasuk dengan berulang kali terkena razia dan keluar masuk panti rehabilitasi. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk mengatasinya dengan membuat kebijakan yaitu Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), kemudian peneliti tertarik untuk mengambil salah satu jenis penyandang masalah yaitu gelandangan dan pengemis yang menjadi masalah prioritas yang ditangani Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Sosial Kota Surabaya. Dari uraian di atas sesuai dengan bidang Ilmu Administrasi Negara dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana keefektifan implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran mengenai keefektifan implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial kota Surabaya, dimana dengan menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan mengambil informan sebanyak 14 orang, sedangkan teknik analisa data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik penarikan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber data. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis kurang berjalan efektif karena belum optimal penanganannya. Hal ini juga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis. Faktor penghambatnya antara lain karena faktor sumberdaya berupa staf pekerja sosial profesional belum terpenuhi jumlahnya, sarana dan prasarana di Panti Liponsos Keputih yang kurang memadai, kemudian faktor koordinasi lintas sektor instansi yang terkait dalam kebijakan ini belum berjalan dengan baik, faktor lingkungan seperti keadaan sosial dan ekonomi, kemiskinan, urbanisasi dan kelompok sasaran yang belum mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis. Kemudian ada beberapa faktor pendukung antara lain sikap pelaksana yaitu aparat Dinas Sosial Kota Surabaya yang sepenuhnya mendukung kebijakan ini dan faktor komunikasi, baik diantara instansi atau dinas-dinas yang terlibat dalam kebijakan maupun dengan kelompok sasaran dirasakan cukup baik.

Kata Kunci: Kebijakan Penanggulangan Gepeng (gelandangan dan pengemis), Keefektifan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gepeng.

ABSTRACT

Beggars and the homeless are one of society's groups who are less fortunate in life, in the middle of densely big cities such as Surabaya. They are defecated by poverty and social problems which strike their life, so that they have to be beggars and homeless. Having no skill and enough ability make them keep depending on their 'works.' Yet, their existence makes restless the local government and all the people living around it because they build dirty buildings/house or slum in the edge of rivers. After getting raid by policemen for several times, they still do not give their profession up. They keep returning to be homeless and beggar. Beside, since the homeless and beggar who come from out of Surabaya region do not have any place to live in, do not have house or relative to live with, then they will let everything happens several times in Surabaya, including by taking raid by the policemen, coming in and coming out from the rehabilitation which is also something common for them. Surabaya's local government gives their effort to cope with it by making a policy, that is *Penanganan PMKS—Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*—"The Handling of the Victims of Social Prosperous Problems". The researcher of this thesis is then interested to take one of the social problem victim, beggar and the homeless who becomes the priority problem handled by Surabaya's local government, especially Surabaya Social Department, as the material of her research.

From the description above, according to the science of Country's Administration, in this research the writer wants to know about the effectivity of implementing beggar and the homeless policy and several factors which become the obstacles and support the implementation of the policy. The method used in this research is qualitative descriptive which aims to give an illustration toward the effectivity of the homeless and beggar policy implementation in Surabaya's social department. The research is done by using *purposive sampling* which takes 14 informants; while the data analysis technique is done by using data reduction, data presentation and taking out the conclusion. The technique in taking the valid data used in this research is the technique of triangular data source.

From the research which has been done, the result is that the effectivity in implementing beggar and the homeless preventing policy runs less effectively since there are some factors which become the obstacles of the policy implementation. Some obstacles and supports of the implementation of the program are: the obstacles are human resource factor, including professional social workers in handling *Penanganan PMKS*, especially because the necessity of the number, then there is also coordination factors of cross-institution sectors related to the policy which has not ran well, environment and targeted group factors which has not fully supported the policy of beggar and homeless preventing. Then, there are also some supportive factors, such as the attitude of the implementers, that is Surabaya's Social Department which fully supports the implementation of the policy; and also communication factor, both between the agency and some departments related to the policy and targeted group which is felt running very well.

Keywords: the beggar and homeless preventing policy, the effectivity in implementing the beggar and homeless preventing policy.